



Rencana Kerja 2024

Disusun Oleh:
Bappelitbangda
Kabupaten Purwakarta

(0264) 8307463

Jl. Gandanegara No. 25
Purwakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan BAPPELITBANGDA untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 di BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2024.

Kami berharap dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, sehingga pembangunan di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURWAKARTA,



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|--------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| | |
| BAB. I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Landasan Hukum | I-4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | I-4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | I-4 |
| | |
| BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN LALU | II-1 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | II-1 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda | II-21 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi | II-41 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | II-41 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Bappelitbangda | II-57 |
| | |
| BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA | III-1 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | III-1 |
| 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bappelitbangda | III-4 |
| 3.3 Program dan Kegiatan Bappelitbangda..... | III-6 |
| | |
| BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA | IV-1 |
| | |
| BAB. V PENUTUP | V-1 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLNRI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2019 Nomor 187);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Bappelitbangda sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda

BAB V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2024 – 2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk masa transisi selama 2 (dua) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2022 telah selesai dilaksanakan diantaranya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah Nomor 88 Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Tahun 2024 yang secara keseluruhan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, pelaksanaan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta (APBD Perubahan Tahun 2022) mencapai sebesar

Rp. 11.000.307.833,00 atau 91,39 % dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp. 12.036.621.130,00. Anggaran dan Realisasi Belanja dalam APBD Perubahan Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran adalah seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Relalisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan
Di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

| PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | ANGGARAN (RP) | REALISASI | % |
|--|---|--------------|---|------------------|------------|--------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24.990.600 | 22.990.600 | 92,00 |
| | | 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 14.993.600 | 14.993.600 | 100,00 |
| | | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.941.000 | 9.881.000 | 99,40 |
| | | 4. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 14.982.700 | 14.982.700 | 100,00 |
| | | 5. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 9.997.400 | 9.997.400 | 100,00 |
| | | 6. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 29.972.700 | 28.045.200 | 93,57 |

| PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | ANGGARAN (RP) | REALISASI | % |
|---|--|---------------------|--|----------------------|------------------|----------|
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.383.733.244 | 6.987.077.721 | 90,97 |
| | | 2 | Koordinais dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 40.088.800 | 19.437.550 | 48,49 |
| | 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribu Kelengkapannya | 89.950.000 | 89.362.500 | 99,35 |
| | | 1. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50.000.000 | = | - |
| | | 2. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 74.999.700 | 72.030.000 | 96,04 |
| | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 49.992.800 | 49.977.250 | 99,97 |
| | | 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 99.905.950 | 99.698.000 | 99,79 |
| | | 3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 49.925.950 | 49.922.150 | 99,99 |

| PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | ANGGARAN (RP) | REALISASI | % | |
|----------------|-----------------|---------------------|--|---|------------------|-------------|--------|
| | | 4. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 94.257.450 | 94.189.336 | 99,93 | |
| | | 5. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 99.970.300 | 72.547.150 | 72,57 | |
| | | 6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 99.832.000 | 94.751.700 | 94,91 | |
| | | 5. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Pengadaan Mebel | 124.438.050 | 123.418.000 | 99,18 |
| | | 6. | Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 174.220.350 | 173.671.000 | 99,68 |
| | | 6. | | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,00 |
| | | | | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 74.900.000 | 32.180.910 | 42,97 |

| PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | ANGGARAN (RP) | REALISASI | % |
|--|--|---------------------|--|--------------------------|------------------|----------|
| | | 3. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 49.800.000 | 49.480.000 | 99,36 |
| | | 4. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 222.662.736 | 208.797.496 | 93,77 |
| | 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 120.000.000 | 84.453.847 | 70,38 |
| | | 2. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 152.368.000 | 151.566.000 | 99,47 |
| | | 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 160.200.000 | 159.961.823 | 99,85 |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1. Penyusunan Perencanaan Pendanaan | 1. | Koordinasi Penelahaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 99.999.900 | 99.600.000 | 99,60 |

| PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | ANGGARAN (RP) | REALISASI | % |
|----------------|-----------------|---------------------|---|--------------------------|------------------|----------|
| | | 2. | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 34.999.400 | 27.799.400 | 79,43 |
| | | 3. | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | 34.999.800 | 34.999.800 | 100,00 |
| | | 4. | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 149.999.850 | 147.194.850 | 98,13 |
| | | 5. | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 50.000.000 | 49.479.000 | 98,96 |
| | | 6. | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 549.999.900 | 546.238.500 | 99,32 |

Sumber : LAKIP Bappelitbangda Kab. Purwakarta Tahun 2022

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat 4 (Empat) Sub Kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dibawah 80,00 % , mengingat sub kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini menunjukan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2022 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan.

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pelaksanaan Renstra PD

s.d Tahun 2022 di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | SATUAN | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan | | |
|------|---|---|---------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD tahun 2022 | Realisasi Renja PD tahun 2022 | Tingkat Realisasi | | Realisasi capaian Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan sd tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | BIDANG PERENCANAAN | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | A | | A | AA | 125 | B | AA | 125 | |
| | | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | 100 | | 100 | 81,58 | 81,58 | 90 | 0 | - | |
| | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun | Dokumen | 7 | | 7 | 8 | 114,2857 | 6 | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|----|--|----|----|----------|----|---|---|
| | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 3 | 300 | 2 | - | - |
| | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kegiatan | 3 | | 3 | 2 | 66,66667 | 3 | - | - |
| | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Bagi Pegawai Bappelitbangda Beserta Kelengkapannya | Paket | 2 | | 2 | 2 | 100 | - | - | - |
| | 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsinya | Orang | 2 | | 2 | - | #VALUE! | 10 | - | - |
| | 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 50 | | 50 | 50 | 100 | 40 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|----|--|----|----|-----|---|---|---|
| | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Paket | 7 | | 7 | 7 | 100 | 7 | - | - |
| | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Paket | 2 | | 2 | 1 | 50 | 2 | - | - |
| | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah | Bulan | 12 | | 12 | 12 | 100 | 1 | - | - |
| | 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | | - | - | - | 1 | - | - |
| | 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | | - | - | - | 1 | - | - |
| | 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Paket | 2 | | 2 | 2 | 100 | 2 | - | - |
| | 1. Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel Kantor Bappelitbangda | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bappelitbangda | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|----|--|----|----|-----|----|---|---|
| | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Paket | 4 | | 4 | 4 | 100 | 4 | - | - |
| | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Materai 6000 dan Materai 3000 | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta | Bulan | 12 | | 12 | 12 | 100 | 12 | - | - |
| | 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Orang | 7 | | 7 | 7 | 100 | 7 | - | - |
| | 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Paket | 3 | | 3 | 3 | 100 | 3 | - | - |
| | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 27 | | 27 | 27 | 100 | 21 | - | - |
| | 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Bappelitbangda | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bappelitbangda | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| 2. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|-----|--|-----|---|-----|---|----|----------|
| | | Percentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | 66 | 66 |
| | | Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan | Persen | 95 | | 95 | | 96 | | 41 | 42,70833 |
| | | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Persen | 95 | | 95 | | 96 | | 94 | 97,91667 |
| | 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun | Dokumen | 7 | | 7 | 7 | 100 | 7 | 5 | 71,42851 |
| | 1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 2. Pelaksanaan Konsultasi Publik | Kegiatan Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | 3. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | 4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten Yang Dilaksanakan | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----|--|----|----|-----|----|---|-----|
| | 5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan | Kecamatan | 17 | | 17 | 17 | 100 | 17 | 1 | 100 |
| | 6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Yang Disusun | Dokumen | 2 | | 2 | 2 | 100 | 2 | - | - |
| | 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Yang Disusun | Dokumen | 2 | | 2 | 2 | 100 | 2 | - | - |
| | 1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Analisis Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Paket | 1 | | 1 | 1 | 100 | 21 | - | - |
| | 2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 5 | 500 | 25 | - | - |
| | 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Yang Disusun | Dokumen | 2 | | 2 | 2 | 100 | 2 | - | - |
| | 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 3 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------|----|--|----|---|-----|---|----|----------|
| 3. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Percentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD | Persen | 87 | | 87 | | 89 | | 70 | 78,65169 |
| | 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Dokumen | 4 | | 4 | 4 | 100 | 4 | - | - |
| | 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Yang Diasistensi | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi yang Dilaksanakan | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam) | Dokumen | 5 | | 5 | 4 | 80 | 4 | - | - |
| | 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun | Dokumen | 2 | | 2 | 1 | 50 | 1 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|---|--|---|---|-----|---|---|---|
| | 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Yang Diasistensi | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Yang Dilaksanakan | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi yang Dilaksanakan | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah | Dokumen | 4 | | 4 | 4 | 100 | 4 | - | - |
| | 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Yang Diasistensi | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Yang Dilaksanakan | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---------------|-----------|--|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------------|
| | 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi yang Dilaksanakan | Kegiatan | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| 5.02 | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | |
| 1. | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Penelitian Pembangunan yang Sesuai Dengan Kebutuhan | Persen | 95 | | 95 | | 96 | 86 | | 89,58333 |
| | | Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis IPTEK Dalam Pembangunan Daerah | Persen | 95 | | 95 | | 96 | 28 | | 29,16667 |
| | 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Dokumen | 2 | | 2 | | 0 | 2 | - | - |
| | 1. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Kajian Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | - | 0 | - | - | - |
| | 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Kajian Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | - | 0 | - | - | - |
| | 3. Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana | Jumlah Dokumen Hasil Kajian Yang Disusun | Dokumen | - | | - | - | - | 1 | - | - |
| | 4. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Kajian Yang Disusun | Dokumen | - | | - | - | - | 1 | - | - |
| | 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 2 | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|---|--|---|---|-----|---|---|---|
| | 1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Kajian Yang Disusun | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| | 2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Kajian Yang Disusun | Dokumen | - | | - | - | - | 1 | - | - |
| | 3. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Kajian Yang Disusun | Dokumen | - | | - | - | - | 1 | - | - |
| | 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Dokumen | 2 | | 2 | 2 | 100 | 2 | - | - |
| | 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayaan Teknologi dan Inovasi Yang Dilaksanakan | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |
| | 2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Jumlah Diseminasi, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Inovatif | Dokumen | 1 | | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - |

Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran mencapai sebesar Rp. 13.415.262.186,00 terdiri atas 4 Program, 16 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan, dengan estimasi capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 % serta tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- a. Masih Terdapat Usulan Kegiatan yang Setelah Diinventarisasi Belum Sesuai Dengan Rencana Kegiatan yang Telah Dicanangkan Pada Renstra maupun Renja Bappelitbangda.
- b. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-Data Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung Secara Optimal, Sehingga Berpengaruh Terhadap Kualitas Penyusunan Hasil Kajian.
- c. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Aparatur Perencanaa Bappelitbangda yang Berkualitas Sehingga Berdampak Pada Kualitas Produk Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, maka pada Tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta menyusun Strategi :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan daerah; dan
- c. Menerapkan hasil kajian penelitian dan pengembangan dan inovasi daerah dalam dokumen perencanaan daerah.

Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan barbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan; dan

- c. Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPELITBANGDA

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta merupakan Unsur Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 249 Tahun 2021 mempunyai Tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Perumusan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c) Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- d) Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Lingkup Tugas dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum. Sekretariat terdiri atas :

a. Kelompok Sub Subtansi Program

Kelompok Sub Subtansi Program mempunyai tugas :

- Mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan, yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), urusan pemerintahan yang diselenggarakan Badan dan Profil Badan;
- Melakukan Pengolahan dan Analisis Data/Bahan Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan;
- Mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan; dan
- Mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan.

b. Kelompok Sub Subtansi Kepegawaian dan Umum

Kelompok Sub Subtansi Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

- Menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Kepegawaian dan Umum;
- Menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;
- Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan, data pegawai, kartu pegawai, kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga,

asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan penilaian angka kredit jabatan fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin pernikawinan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai;

- Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Badan;
- Mengelola barang/aset milik daerah di lingkup Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan administrasi dokumen Badan dan kearsipan;
- Mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokoler dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) di lingkup Badan;
- Mengelola sarana dan prasarana Badan;
- Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
- Menyiapkan usulan bendaharawan barang dan petugas inventaris barang; dan
- Menyiapkan usulan panitia pengadaan barang/jasa dan panitia pemeriksa barang/jasa.

c. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan Badan.

3. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek bidang perhubungan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman.

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah ini terdiri atas :

a. Kelompok Sub Subtansi Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Kelompok Sub Subtansi Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan pembiayaan pembangunan daerah lingkup koordinasi Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang meliputi aspek bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi dokumen perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan sejenisnya) pada Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- Melaksanakan pengkajian dan penganalisaan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

- Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi capaian rencana target kinerja dengan realisasi hasil pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan dalam lingkup koordinasi bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kelompok Sub Subtansi Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kelompok Sub Subtansi Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan pembiayaan pembangunan daerah lingkup koordinasi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi aspek Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi dokumen perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan sejenisnya) pada Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Melaksanakan pengkajian dan penganalisaan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi capaian rencana target kinerja dengan realisasi hasil pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan dalam lingkup koordinasi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Sub Subtansi Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kelompok Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan pembiayaan pembangunan daerah lingkup koordinasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi aspek Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi dokumen perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
 - Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan sejenisnya) pada Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Melaksanakan pengkajian dan penganalisaan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi capaian rencana target kinerja dengan realisasi hasil pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan dalam lingkup koordinasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek bidang perencanaan pangan, pertanian, perikanan, peternakan, sumber daya alam, kebudayaan, pariwisata, koperasi, usaha kecil mikro, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam ini terdiri atas :

a. Kelompok Sub Subtansi Pangan dan Sumber Daya Alam

Kelompok Sub Subtansi Pangan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan pembiayaan pembangunan daerah lingkup koordinasi Bidang Pangan dan Sumber Daya Alam yang meliputi Aspek Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Sumber Daya Alam;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi dokumen perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan sejenisnya) pada Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pangan dan Sumber Daya Alam;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pangan dan Sumber Daya Alam;
- Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pangan dan Sumber Daya Alam;
- Melaksanakan pengkajian dan penganalisaan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pangan dan Sumber Daya Alam;

- Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi capaian rencana target kinerja dengan realisasi hasil pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan dalam lingkup koordinasi Bidang Pangan dan Sumber Daya Alam; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Sub Subtansi Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah
- Kelompok Sub Subtansi Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan pembiayaan pembangunan daerah lingkup koordinasi Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi Aspek Bidang, Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil Mikro;
 - Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi dokumen perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
 - Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan sejenisnya) pada Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - Melaksanakan pengkajian dan penganalisaan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi capaian rencana target kinerja dengan realisasi hasil pembangunan daerah sesuai

dengan dokumen perencanaan dalam lingkup koordinasi Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kelompok Sub Subtansi Industri, Perdagangan dan Investasi

Kelompok Sub Subtansi Industri, Perdagangan dan Investasi mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan pembiayaan pembangunan daerah lingkup koordinasi Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi yang meliputi Aspek Bidang Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi dokumen perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan sejenisnya) pada Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
- Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
- Melaksanakan pengkajian dan penganalisaan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
- Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi capaian rencana target kinerja dengan realisasi hasil pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan dalam lingkup koordinasi Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, pendidikan, kecamatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesatuan bangsa dan politik, kepemudaan dan olahraga, kearsipan, perpustakaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ini terdiri atas :

a. Kelompok Sub Subtansi Pemerintahan

Kelompok Sub Subtansi Pemerintahan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan pembiayaan pembangunan daerah lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan yang meliputi Aspek Bidang Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi dokumen perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan sejenisnya) pada Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan;

- Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan;
- Melaksanakan pengkajian dan penganalisaan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan;
- Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi capaian rencana target kinerja dengan realisasi hasil pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan dalam lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kelompok Sub Subtansi Pembangunan Manusia

Kelompok Sub Subtansi Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan pembiayaan pembangunan daerah lingkup koordinasi Bidang Pembangunan Manusia yang meliputi Aspek Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pendidikan, Kecamatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Kearsipan, Perpustakaan;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi dokumen perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan sejenisnya) pada Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pembangunan Manusia;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pembangunan Manusia;
- Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pembangunan Manusia;

- Melaksanakan pengkajian dan penganalisaan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Pembangunan Manusia;
- Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi capaian rencana target kinerja dengan realisasi hasil pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan dalam lingkup koordinasi Bidang Pembangunan Manusia; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kelompok Sub Subtansi Kesejahteraan Sosial

Kelompok Sub Subtansi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan pembiayaan pembangunan daerah lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial yang meliputi Aspek Bidang Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi dokumen perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan sejenisnya) pada Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Melaksanakan pengkajian dan penganalisaan serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi capaian rencana target kinerja dengan realisasi hasil pembangunan daerah sesuai

- dengan dokumen perencanaan dalam lingkup koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan penyusunan perencanaan, pembiayaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini terdiri atas :

a. Kelompok Sub Subtansi Perencanaan

Kelompok Sub Subtansi Perencanaan mempunyai tugas :

- Menyusun dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten;
- Melaksanakan monitoring dan memberikan arahan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- Melaksanakan konsultasi, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kelompok Sub Subtansi Pembiayaan

Kelompok Sub Subtansi Pembiayaan mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan pengelolaan perencanaan dan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah yang berbasis elektronik (e_planning);
- Menyelenggarakan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan perencanaan dan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah baik

- secara manual maupun berbasis elektronik (e_planning dan e_budgeting);
- Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pemberian kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Non APBD/APBN;
 - Melaksanakan pengelolaan usulan pemberian kegiatan pembangunan daerah, secara manual dan melalui sistem aplikasi perencanaan;
 - Merumuskan kebijakan pemberian kegiatan prioritas pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Non APBD/APBN;
 - Melaksanakan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi pemberian kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Non APBD/APBN;
 - Mengelola proses input data kedalam sistem perencanaan (e_planning) terkait usulan kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBN (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) dan APBD Provinsi (bantuan keuangan Provinsi); dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kelompok Sub Subtansi Evaluasi

Kelompok Sub Subtansi Evaluasi mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan kebijakan teknis evaluasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- Menghimpun bahan evaluasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan penyusunan evaluasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;

- Melaksanakan koordinasi dan tindaklanjut hasil evaluasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan pembangunan daerah.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan ini terdiri atas :

a. Kelompok Sub Subtansi Penelitian

Kelompok Sub Subtansi Penelitian mempunyai tugas :

- Melaksanakan penelitian berbagai bidang pembangunan yang telah menjadi urusan pemerintah daerah;
- Melaksanakan penerapan hasil penelitian berbagai bidang pembangunan yang telah menjadi urusan pemerintah daerah;
- Melaksanakan telaahan dan kajian terhadap isu-isu strategis pembangunan;
- Melaksanakan analisis kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau kepala daerah;
- Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan pihak perguruan tinggi atau kalangan akademis;
- Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan/atau antar PD (Perangkat Daerah) dalam bidang penelitian dan pengembangan;
- Melaksanakan berbagai macam survey yang berkaitan dengan opini publik terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Melaksanakan kajian terhadap permasalahan pembangunan baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan;
- Melaksanakan kompilasi berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan;

- Melaksanakan fasilitasi *Focus Group Discussion* (FGD) dan forum ilmiah yang berkaitan dengan upaya pengembangan pembangunan daerah;
- Melaksanakan analisis dan identifikasi kebijakan nasional yang berpengaruh pada pembangunan daerah;
- Melaksanakan perumusan terhadap inovasi daerah dan teknologi tepat guna; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kelompok Sub Subtansi Pengembangan Data dan Informasi

Kelompok Sub Subtansi Pengembangan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyusunan struktur data guna memudahkan dalam pengumpulan data dan akses mendapatkan data;
- Melaksanakan pengumpulan data berbagai bidang pembangunan dari perangkat daerah (PD);
- Melaksanakan pengumpulan data dan informasi khusus dari lembaga tertentu yang ada kaitannya dengan daerah;
- Melaksanakan kompilasi data dan informasi yang telah dipublikasikan oleh Badan/Instansi terkait tingkat Kabupaten;
- Melaksanakan kompilasi data dan informasi yang telah dipublikasikan oleh Badan/Instansi terkait tingkat provinsi dan nasional yang berkaitan dengan daerah;
- Melaksanakan sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- Melaksanakan penyajian dan pengembangan data dan informasi dalam bentuk cetak manual dan bentuk digital atau media berbasis web;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama Dinas/Instansi dalam bentuk forum data;
- Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pengelola data dan informasi baik tingkat pusat maupun provinsi;
- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi guna mendukung penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan;

- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi guna mendukung penyusunan dokumen-dokumen yang berakitan dengan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kelompok Sub Subtansi Pelaporan

Kelompok Sub Subtansi Pelaporan mempunyai tugas :

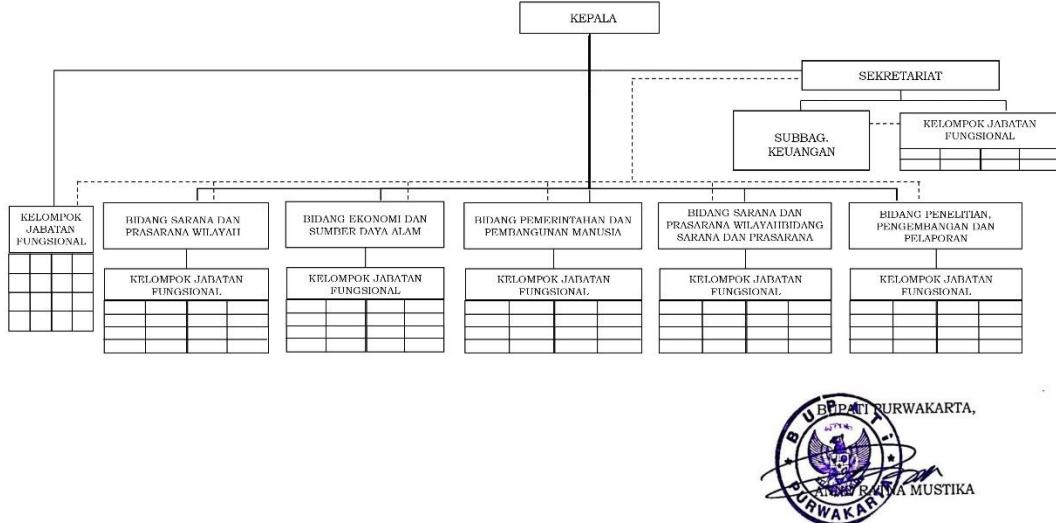
- Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaporan pembangunan daerah;
- Menghimpun data dan informasi sebagai bahan penyusunan laporan;
- Melaksanakan koordinasi, klarifikasi, fasilitasi dan konsultasi atas capaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- Menyusun pelaporan hasil capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah baik yang dibiayai oleh APBD, APBN dan Non APBD/APBN;
- Menyusun dokumen pelaporan capaian kinerja pembangunan daerah;
- Menyiapkan bahan dan prosedur penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- Menyiapkan bahan koordinasi atas capaian pelaksanaan pembangunan daerah;
- Melaksanakan pengelolaan laporan guna penyusunan dokumentasi kinerja hasil pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan laporan yang akan disampaikan ke pusat maupun provinsi; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPTELITBANGDA) Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 48 Tahun 2023 :

Gambar 2.3
Bagan Struktur Organisasi
BAPPTELITBANGDA Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 48 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



Sumber : SOTK Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BAPPTELITBANGDA Kabupaten Purwakarta telah menerapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Berupa Penyediaan dan Penyusunan Dokumen-Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten Purwakarta, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Berikut adalah Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta :

| No | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------|--|---------------------------------|------|------|------|-------------------|-------|----------|------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Persentase Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | B | B | B | AA | AA | AA | AA | AA | |
| 2 | Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan | | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | 90 | 90 | 90 | - | 89,06 | 81,58 | 90 | - | |
| | | | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan | 94 | 95 | 96 | - | 90,85 | 95,6 | 96,5 | - | |
| 3 | Persentase Implementasi Kajian Pembagunan Daerah | | Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | 94 | 95 | 96 | - | 100 | 100 | - | - | |
| | | | Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 85 | 87 | 89 | 100 | 90,75 | 89,42 | 90 | 100 | |
| | | | Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | 85 | 87 | 89 | 100 | 85,79 | 84,47 | 86 | 100 | |
| | | | Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya | 85 | 87 | 89 | 100 | 87,47 | 87,8 | 89 | 100 | |

| No | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------|--|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 4 | Tingkat Ketersediaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah | | Percentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan | 94 | 95 | 96 | - | 90,68 | 74 | 80 | - | |
| | | | Percentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah | 94 | 95 | 96 | 100 | 84,25 | 80 | 84 | 100 | |

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPPELITBANGDA

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti Pendidikan Lanjutan, Kursus, Pelatihan untuk Meningkatkan Profesionalisme Bidang Perencanaan Sehingga Dapat Menghasilkan Aparatur Perencanaan yang Kreatif dan Inovatif;
2. Menerapkan *Right Man On The Right Place* Dalam Penempatan/Perekutan Aparatur. Hal ini Berdampak Pada Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan, Mengingat Aparatur yang Dimiliki Lebih Responsive Terhadap Perkembangan Kebijakan Provinsi dan Nasional serta Menghasilkan Perencanaan Yang Akuntabel;
3. Mengembangkan Teknologi Informasi serta Perangkat Keras dan Kelengkapannya Dalam Mendukung Manajemen Pengelolaan Perencanaan yang Lebih Baik Dalam Menunjang Pembangunan;
4. Optimalisasi Perlengkapan dan Peralatan yang Memadai, serta Penambahan Ruangan untuk Memenuhi Standard Kelayakan Kerja.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Purwakarta dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Purwakarta

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------------|--|----------------|-------------------|--|-----------------|--|----------------|-------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Purwakarta | Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) | AA | 10.617.741.053,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Purwakarta | Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) | AA | 10.617.741.053,00 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun (Dokumen) | 7.00 | 125.000.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun (Dokumen) | 7.00 | 125.000.000,00 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3.00 | 25.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3.00 | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1.00 | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1.00 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1.00 | 10.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1.00 | 10.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1.00 | 15.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1.00 | 15.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|-------|------------------|---|-----------------|--|-------|------------------|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1.00 | 10.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1.00 | 10.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1.00 | 25.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1.00 | 25.000.000,00 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2.00 | 25.000.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 2.00 | 25.000.000,00 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun (Dokumen) | 3.00 | 8.296.875.050,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun (Dokumen) | 3.00 | 8.296.875.050,00 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Purwakarta | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 43.00 | 8.246.875.050,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Purwakarta | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 43.00 | 8.246.875.050,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1.00 | 25.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1.00 | 25.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1.00 | 25.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan) | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1.00 | 25.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|-------|----------------|---|-----------------|--|-------|----------------|--|
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Administrasi BMD PD Yang Disusun (Dokumen) | 2 | 50.000.000,00 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Administrasi BMD PD Yang Disusun (Dokumen) | 2 | 50.000.000,00 | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1.00 | 25.000.000,00 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1.00 | 25.000.000,00 | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1.00 | 25.000.000,00 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1.00 | 25.000.000,00 | |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Adminstrasi Kepegawaian Yang Disusun (Laporan) | 4 | 410.000.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Adminstrasi Kepegawaian Yang Disusun (Laporan) | 4 | 410.000.000,00 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket) | 1.00 | 85.000.000,00 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket) | 1.00 | 85.000.000,00 | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1.00 | 25.000.000,00 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1.00 | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6.00 | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6.00 | | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Purwakarta | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 50.00 | 200.000.000,00 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Purwakarta | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 50.00 | 200.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|-------|----------------|--|-----------------|---|-------|----------------|--|
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun (Laporan) | 8 | 680.866.003,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun (Laporan) | 8 | 680.866.003,00 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.00 | 55.866.003,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.00 | 55.866.003,00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.00 | 100.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1.00 | 100.000.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1.00 | 75.000.000,00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 3.00 | 100.000.000,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 3.00 | 100.000.000,00 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1.00 | 100.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1.00 | 100.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 48.00 | 150.000.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 48.00 | 150.000.000,00 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1.00 | 25.000.000,00 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1.00 | 25.000.000,00 | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|-------|----------------|--|-----------------|---|-------|----------------|--|
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun (Dokumen) | 3 | 350.000.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun (Dokumen) | 3 | 350.000.000,00 | |
| | Pengadaan Mebel | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1.00 | 125.000.000,00 | Pengadaan Mebel | Kab. Purwakarta | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1.00 | 125.000.000,00 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Purwakarta | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.00 | 125.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Purwakarta | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.00 | 125.000.000,00 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Purwakarta | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.00 | 100.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Purwakarta | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1.00 | 100.000.000,00 | |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan (Jasa) | 4 | 380.000.000,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan (Jasa) | 4 | 380.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1.00 | 5.000.000,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1.00 | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12.00 | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12.00 | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1.00 | 50.000.000,00 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1.00 | 50.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1.00 | 250.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1.00 | 250.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|-------|------------------|--|-----------------|---|-------|------------------|--|
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Yang Dibutuhkan (Laporan) | 3 | 325.000.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Yang Dibutuhkan (Laporan) | 3 | 325.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Purwakarta | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 17.00 | 125.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Purwakarta | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 17.00 | 125.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Purwakarta | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1.00 | 100.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Purwakarta | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1.00 | 100.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Purwakarta | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1.00 | 100.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Kab. Purwakarta | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1.00 | 100.000.000,00 | |
| II | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Kab. Purwakarta | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada) (Dokumen) | Ada | 1.175.000.000,00 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Kab. Purwakarta | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada) (Dokumen) | Ada | 1.175.000.000,00 | |
| | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada) (Dokumen) | Ada | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada) (Dokumen) | Ada | | |
| | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDA yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada) (Dokumen) | Ada | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDA yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada) (Dokumen) | Ada | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-------|----------------|---|-----------------|---|-------|----------------|--|
| | | | Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu (Persentase) | 100 | | | | Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu (Persentase) | 100 | | |
| | | | Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada) (Dokumen) | Ada | | | | Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada) (Dokumen) | Ada | | |
| | | | Capaian Kinerja RKPD (Persentase) | 89 | | | | Capaian Kinerja RKPD (Persentase) | 89 | | |
| 1 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah Yang Disusun (Dokumen) | 7 | 800.000.000,00 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah Yang Disusun (Dokumen) | 7 | 800.000.000,00 | |
| | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Kab. Purwakarta | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen) | 1.00 | 100.000.000,00 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Kab. Purwakarta | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen) | 1.00 | 100.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Kab. Purwakarta | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) | 1 | 100.000.000,00 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Kab. Purwakarta | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) | 1 | 100.000.000,00 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara) | 1.00 | 75.000.000,00 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Kab. Purwakarta | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 1.00 | 200.000.000,00 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Kab. Purwakarta | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 1.00 | 200.000.000,00 | |
| | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Kab. Purwakarta | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan) | 17.00 | 75.000.000,00 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Kab. Purwakarta | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan) | 17.00 | 75.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------|----------------|---|-----------------|---|------|----------------|--|
| | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | 3.00 | 250.000.000,00 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | 3.00 | 250.000.000,00 | |
| 2 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Dokumen Analisis dan Informasi Pemerintahan Daerah Yang Disusun (Laporan) | 2 | 200.000.000,00 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Dokumen Analisis dan Informasi Pemerintahan Daerah Yang Disusun (Laporan) | 2 | 200.000.000,00 | |
| | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) | 1.00 | 100.000.000,00 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) | 1.00 | 100.000.000,00 | |
| | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Purwakarta | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku) | 5.00 | 100.000.000,00 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Purwakarta | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku) | 5.00 | 100.000.000,00 | |
| 3 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Yang Disusun (Laporan) | 4 | 175.000.000,00 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Yang Disusun (Laporan) | 4 | 175.000.000,00 | |
| | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 1.00 | 75.000.000,00 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | 3.00 | 100.000.000,00 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | 3.00 | 100.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|-------|----------------|---|-----------------|--|-------|----------------|--|
| III | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kab. Purwakarta | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Persentase) | 100 | 750.000.000,00 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kab. Purwakarta | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Persentase) | 100 | 750.000.000,00 | |
| | | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (Persentase) | 100 | | | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (Persentase) | 100 | | |
| | | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase) | 100 | | | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase) | 100 | | |
| 1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang PPM Yang Disusun (Laporan) | 4 | 350.000.000,00 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang PPM Yang Disusun (Laporan) | 4 | 350.000.000,00 | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2.00 | 75.000.000,00 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2.00 | 75.000.000,00 | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | 38.00 | 75.000.000,00 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | 38.00 | 75.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | 1.00 | 50.000.000,00 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | 1.00 | 50.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|------|----------------|---|-----------------|--|------|----------------|--|
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) | 1.00 | 150.000.000,00 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) | 1.00 | 150.000.000,00 | |
| 2 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Yang Disusun (Laporan) | 4 | 200.000.000,00 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Yang Disusun (Laporan) | 4 | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2.00 | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2.00 | | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | 6.00 | 50.000.000,00 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | 6.00 | 50.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | 6.00 | 25.000.000,00 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | 6.00 | 25.000.000,00 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) | 1.00 | 75.000.000,00 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) | 1.00 | 75.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|---|------|------------------|--|-----------------|---|------|------------------|--|
| 3 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya Yang Disusun (Laporan) | 4 | 200.000.000,00 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya Yang Disusun (Laporan) | 4 | 200.000.000,00 | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2.00 | 50.000.000,00 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 2.00 | 50.000.000,00 | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4.00 | 50.000.000,00 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4.00 | 50.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4.00 | 25.000.000,00 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4.00 | 25.000.000,00 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) | 1.00 | 75.000.000,00 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| IV | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Kab. Purwakarta | Persentase implementasi rencana kelitbangaan (Persentase) | 10 | 1.150.000.000,00 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Kab. Purwakarta | Persentase implementasi rencana kelitbangaan (Persentase) | 10 | 1.150.000.000,00 | |
| | | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangaan (Persentase) | 100 | | | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangaan (Persentase) | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-------|----------------|---|-----------------|---|-------|----------------|--|
| | | | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (Persentase) | 42,55 | | | | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (Persentase) | 42,55 | | |
| | | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. (Persentase) | 100 | | | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. (Persentase) | 100 | | |
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun (Laporan) | 5 | 375.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun (Laporan) | 5 | 375.000.000,00 | |
| | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan) | 1,00 | 75.000.000,00 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan) | 1,00 | 75.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan) | 1,00 | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan) | 1,00 | | |
| | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan) | 1,00 | 75.000.000,00 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan) | 1,00 | 75.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|------|----------------|--|-----------------|---|------|----------------|--|
| | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan) | 1.00 | 75.000.000,00 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Kab. Purwakarta | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan) | 1.00 | 75.000.000,00 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Kab. Purwakarta | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| 2 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Yang Disusun (Dokumen) | 4 | 300.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Yang Disusun (Dokumen) | 4 | 300.000.000,00 | |
| | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen) | 1.00 | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen) | 1.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|------|----------------|--|-----------------|---|------|----------------|--|
| 3 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Disusun (Dokumen) | 4 | 300.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Disusun (Dokumen) | 4 | 300.000.000,00 | |
| | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| 4 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi Yang Disusun (Laporan) | 3 | 175.000.000,00 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi Yang Disusun (Laporan) | 3 | 175.000.000,00 | |
| | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kab. Purwakarta | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen) | 1.00 | 75.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) | 1.00 | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) | 1.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|------|---------------|--|-----------------|---|------|---------------|
| Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan) | 1.00 | 50.000.000,00 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Kab. Purwakarta | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan) | 1.00 | 50.000.000,00 |
|--|-----------------|---|------|---------------|--|-----------------|---|------|---------------|

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT BAPPELITBANGDA

Kabupaten Purwakarta akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA PERANGKAT
DAERAH : BAPPELITBANGDA

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BAPPELITBANGDA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat **7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional** diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari **7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional** tersebut diatas diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan

mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- i. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPELITBANGDA

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Adapun Visi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah ” PURWAKARTA

CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH.”

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal;
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut maka Bappelitbangda mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Capaiannya sesuai dengan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, seperti yang tersaji dalam Tabel berikut ini :

**Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Tahun 2024-2026**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Target Kinerja | | |
|----|--|--|-----------------------------------|----------|----------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | AA | AA | AA |
| | | | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | | Baik | Baik | Baik |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|-------|-------|-------|
| 2 | Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Harmonis, Inovatif dan Berkelanjutan | Meningkatnya konsistensi dan keselarasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah | 1. Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | 2. Indeks Inovasi Daerah | Skor/ Kategori | 50,62 | 50,68 | 50,74 |

Sumber : Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPELITBANGDA

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2024 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki Indikator : Capaian SAKIP Perangkat Daerah, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - f) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub

Kegiatan:

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini memiliki Indikator : Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada) (Dokumen), Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada) (Dokumen), Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada) (Dokumen), Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu (Persentase), Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada) (Dokumen) dan Capaian Kinerja RKPD (Persentase) dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - b) Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - d) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - e) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - f) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. PPROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini memiliki Indikator : Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Persentase); Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (Persentase); dan Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase), dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- ❖ Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan Sub Kegiatan :
 - a) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

- ❖ Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program ini memiliki Indikator : Persentase implementasi rencana kelitbangannya (Persentase), Persentase pemanfaatan hasil kelitbangannya (Persentase), Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (Persentase), Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (Persentase), dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 - b) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa.
 - c) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa.
 - d) Pengelolaan Data Kelitbangaan dan Peraturan.
- ❖ Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - b) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - c) Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
- ❖ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan Sub Kegiatan :

- a) Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
 - b) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 - c) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - d) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- ❖ Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan Sub Kegiatan :
- a) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - b) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangda

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 di Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dan Perkiraan Maju tahun 2025

Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tanu 2024 | | | | Catata n Pentin g | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaia n Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaia n Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) | | AA | #####/# | | | | 75.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun (Dokumen) | (Bappelitbangda, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta) | 7.00 | 125.000.000,00 | | 7 | 75.000.000,00 | |
| 5.01.01.2.01.000 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | (Bappelitbangda, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta) | 3.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 2.00 | 25.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01.000 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 15.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|------|------------------|------------------------------|--|------|---------------|
| 5.01.01.2.01.000 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 10.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 10.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01.000 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1.00 | 15.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01.000 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 10.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 10.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01.000 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | 1.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | - | - |
| 5.01.01.2.01.000 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan) | | 2.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | - | - |
| 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun (Dokumen) | | 3.00 | 8.286.875.050,00 | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|-------|------------------|------------------------------|---|--|---|
| 5.01.01.2.02.000 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | 43.00 | 8.246.875.050,00 | DANA UMUM | | | - |
| 5.01.01.2.02.000 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | 1.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.02.000 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan) | | 1.00 | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi BMD PD Yang Disusun (Dokumen) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 2 | 40.000.000,00 | | 2 | | - |
| 5.01.01.2.03.000 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | 1.00 | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.03.000 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | 1.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Admininstrasi Kepegawaian Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 375.000.000,00 | | 4 | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-------|------------------|------------------------------|--|---|---|
| 5.01.01.2.05.000 2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | 1.00 | 150.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.05.000 3 | Pendaatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendaatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen) | | 1.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.05.000 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | 6.00 | 50.000.000,00 | | | | |
| 5.01.01.2.05.001 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | 50.00 | 150.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 8 | 1.253.230.485,00 | | | 8 | - |
| 5.01.01.2.06.000 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 1.00 | 75.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.000 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 1.00 | 260.552.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|-------|----------------|------------------------------|--|---|---|
| 5.01.01.2.06.000 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | 1.00 | 100.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.000 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | 3.00 | 200.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.000 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | 1.00 | 205.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.000 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | 48.00 | 225.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.001 0 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen) | | 1.00 | 30.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.001 1 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | | 1.00 | 157.678.485,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun (Dokumen) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 3 | 732.420.160,00 | | | 3 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|-------|----------------|-------------------------------|--|---|---|
| 5.01.01.2.07.000 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | 1.00 | 135.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.07.001 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 1.00 | 200.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.07.001 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 1.00 | 397.420.160,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan (Jasa) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 596.862.736,00 | | | 4 | - |
| 5.01.01.2.08.000 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | 1.00 | 5.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.08.000 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | 12.00 | 75.000.000,00 | | | | |
| 5.01.01.2.08.000 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | 1.00 | 75.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|------------|----------------|-------------------------------|--|---------|---|
| 5.01.01.2.08.000 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan) | | 1.00 | 441.862.736,00 | DANA UMUM | | | - |
| 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Yang Dibutuhkan (Laporan) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 3 | 614.349.355,00 | | | 3 | - |
| 5.01.01.2.09.000 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | 17.00 | 130.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.09.001 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 1.00 | 200.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.09.001 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 1.00 | 284.349.355,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada) (Dokumen) | | Ada | ##### # | | | ##### # | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada) (Dokumen) | | Ada | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|------|------------------|------------------------------|--|------|----------------|
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada) (Dokumen) | | Ada | | | | | |
| | | Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu (Persentase) | | 100 | | | | | |
| | | Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada)(Dokumen) | | Ada | | | | | |
| | | Capaian Kinerja RKPD (Persentase) | | 89 | | | | | |
| 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah Yang Disusun (Dokumen) | (BAPPTELITBANGDA, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta) | 7 | 1.207.500.000,00 | | | 7 | 800.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen) | (Kab. Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 150.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1.00 | 100.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1 | 117.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 100.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 80.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 75.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|-------|----------------|--|--|------|----------------|
| 5.01.02.2.01.000 5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 260.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 200.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.000 6 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 17.00 | 75.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 17 | 75.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.000 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | (BAPPELTBANGDA , Nagri Kidul, Kec. Purwakarta) | 3.00 | 525.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 3.00 | 250.000.000,00 |
| 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Dokumen Analisis dan Informasi Pemerintahan Daerah Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 2 | 132.500.000,00 | | | 2 | 200.000.000,00 |
| 5.01.02.2.02.000 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 77.500.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 100.000.000,00 |
| 5.01.02.2.02.000 3 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku) | (Bappelitabngda, KAB. PURWAKARTA) | 5.00 | 55.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 5 | 100.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-----------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--|---|---|
| 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 143.605.641,00 | | | 4 | - |
| 5.01.02.2.03.000 1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | | 1.00 | 98.605.641,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.02.2.03.000 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | | 3.00 | 45.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Persentase) | | 100 | ##### # | | | | - |
| | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (Persentase) | | 100 | | | | | |
| | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase) | | 100 | | | | | |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang PPM Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 680.000.000,00 | | | 4 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|-------|----------------|------------------------------|---|--|---|
| 5.01.03.2.01.000 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen) | | 2.00 | 192.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.01.000 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | | 38.00 | 50.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.01.000 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | | 1.00 | 50.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.01.000 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) | | 1.00 | 387.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 425.000.000,00 | | 4 | | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|------|----------------|-------------------------------|--|---|---|
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | | 2.00 | 92.500.000,00 | | | | |
| 5.01.03.2.02.000 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | | 6.00 | 107.500.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.02.000 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan) | | 6.00 | 100.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.02.000 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) | | 1.00 | 125.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 432.500.000,00 | | | 4 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|-----------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|
| 5.01.03.2.03.000 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | | 2.00 | 227.918.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.03.000 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | | 4.00 | 62.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.03.000 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | | 4.00 | 80.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.03.000 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) | | 1.00 | 62.082.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase implementasi rencana kelitbangan (Persentase) | | 10 | 848.750.000,00 | | | | - |
| | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan(Persentase) | | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|--|---|---|
| | | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (Persentase) | | 42,55 | | | | | |
| | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. (Persentase) | | 100 | | | | | |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 5 | 182.500.000,00 | | | 5 | - |
| 5.05.02.2.01.000 5 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan) | | 1.00 | 82.500.000,00 | | | | |
| 5.05.02.2.01.001 2 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan) | | 1.00 | 100.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Yang Disusun (Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 200.000.000,00 | | | 4 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------|----------------|------------------------------|--|---|---|
| 5.05.02.2.02.000 2 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen) | | 1.00 | 100.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.05.02.2.02.000 9 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen) | | 1.00 | 100.000.000,00 | | | | |
| 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Disusun(Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 100.000.000,00 | | | 4 | - |
| 5.05.02.2.03.000 7 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen) | | 1.00 | 100.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 3 | 366.250.000,00 | | | 3 | - |
| 5.05.02.2.04.000 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen) | | 1.00 | 140.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|------|----------------|--|
| | | | | | | |
| 5.05.02.2.04.000 3 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) | | 1.00 | 226.250.000,00 | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAPPELITBANGDA

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catata n Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-----------------------|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaia n Kinerj a | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaia n Kinerj a | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) | | AA | ##### ## | | | | 75.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun (Dokumen) | (Bappelitbangda, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta) | 7.00 | 125.000.000,00 | | | 7 | 75.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01.00 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | (Bappelitbangda, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta) | 3.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 2.00 | 25.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01.00 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 15.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|------|------------------|------------------------------|--|------|---------------|
| 5.01.01.2.01.00 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 10.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 10.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01.00 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1.00 | 15.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01.00 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 10.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 10.000.000,00 |
| 5.01.01.2.01.00 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | | 1.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | - | - |
| 5.01.01.2.01.00 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan) | | 2.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun (Dokumen) | | 3.00 | 8.286.875.050,00 | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|-------|------------------|------------------------------|--|---|---|
| 5.01.01.2.02.00 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | 43.00 | 8.246.875.050,00 | DANA UMUM | | | - |
| 5.01.01.2.02.00 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | | 1.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.02.00 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan) | | 1.00 | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi BMD PD Yang Disusun (Dokumen) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 2 | 40.000.000,00 | | | 2 | - |
| 5.01.01.2.03.00 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | 1.00 | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.03.00 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | | 1.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Adminstrasi Kepegawaian Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 375.000.000,00 | | | 4 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-------|-------------------|--|--|---|---|
| 5.01.01.2.05.00 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | 1.00 | 150.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.05.00 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen) | | 1.00 | 25.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.05.00 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | | 6.00 | 50.000.000,00 | | | | |
| 5.01.01.2.05.00 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | 50.00 | 150.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 8 | 1.253.230.485, 00 | | | 8 | - |
| 5.01.01.2.06.00 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 1.00 | 75.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.00 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 1.00 | 260.552.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|-------|----------------|------------------------------|--|---|---|
| 5.01.01.2.06.00 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | | 1.00 | 100.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.00 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | | 3.00 | 200.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.00 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | 1.00 | 205.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.00 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | 48.00 | 225.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.00 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen) | | 1.00 | 30.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.06.00 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | | 1.00 | 157.678.485,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Yang Disusun (Dokumen) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 3 | 732.420.160,00 | | | 3 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|-------|----------------|-------------------------------|--|---|---|
| 5.01.01.2.07.00 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | 1.00 | 135.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.07.00 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 1.00 | 200.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.07.00 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 1.00 | 397.420.160,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Yang Dibutuhkan (Jasa) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 596.862.736,00 | | | 4 | - |
| 5.01.01.2.08.00 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | 1.00 | 5.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.08.00 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | 12.00 | 75.000.000,00 | | | | |
| 5.01.01.2.08.00 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | | 1.00 | 75.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------|---|
| 5.01.01.2.08.00 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan) | | 1.00 | 441.862.736,00 | DANA UMUM | | | - |
| 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Yang Dibutuhkan (Laporan) | (Bappelitbangda Kab Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 3 | 614.349.355,00 | | | 3 | - |
| 5.01.01.2.09.00 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | | 17.00 | 130.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.09.00 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 1.00 | 200.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.01.2.09.00 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 1.00 | 284.349.355,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada) (Dokumen) | | Ada | ##### ## | | | ##### ## | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|------|-------------------|-------------------------------|------|----------------|
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada) (Dokumen) | | Ada | | | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada) (Dokumen) | | Ada | | | | |
| | | Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu (Persentase) | | 100 | | | | |
| | | Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada)(Dokumen) | | Ada | | | | |
| | | Capaian Kinerja RKPD (Persentase) | | 89 | | | | |
| 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah Yang Disusun (Dokumen) | (BAPPELITBANGD A, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta) | 7 | 1.207.500.000, 00 | | 7 | 800.000.000, 0 |
| 5.01.02.2.01.00 02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen) | (Kab. Purwakarta, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 150.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | 1.00 | 100.000.000, 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|-------|----------------|-------------------------------|--|------|----------------|
| 5.01.02.2.01.00 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1 | 117.500.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 100.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.00 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara) | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 80.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 75.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.00 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 260.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 200.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.00 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 17.00 | 75.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 17 | 75.000.000,00 |
| 5.01.02.2.01.00 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | (BAPPELTBANGDA, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta) | 3.00 | 525.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | 3.00 | 250.000.000,00 |
| 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Dokumen Analisis dan Informasi Pemerintahan Daerah Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 2 | 132.500.000,00 | | | 2 | 200.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|------------|---------------------|------------------------------|--|---|----------------|
| 5.01.02.2.02.00 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)(Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 1.00 | 77.500.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1 | 100.000.000,00 |
| 5.01.02.2.02.00 03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 5.00 | 55.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 5 | 100.000.000,00 |
| 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 143.605.641,00 | | | 4 | - |
| 5.01.02.2.03.00 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | | 1.00 | 98.605.641,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.02.2.03.00 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | | 3.00 | 45.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Percentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Percentase) | | 100 | ##### ## | | | | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|-------|----------------|--|---|---|
| | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (Persentase) | | 100 | | | | |
| | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase) | | 100 | | | | |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang PPM Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 680.000.000,00 | | 4 | - |
| 5.01.03.2.01.00 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen) | | 2.00 | 192.500.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | - |
| 5.01.03.2.01.00 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | | 38.00 | 50.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | - |
| 5.01.03.2.01.00 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | | 1.00 | 50.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|------|----------------|--|--|---|---|
| 5.01.03.2.01.00 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) | | 1.00 | 387.500.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 425.000.000,00 | | | 4 | - |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | | 2.00 | 92.500.000,00 | | | | |
| 5.01.03.2.02.00 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | | 6.00 | 107.500.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.02.00 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian(Laporan) | | 6.00 | 100.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|------|----------------|-------------------------------|--|---|---|
| 5.01.03.2.02.00 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) | | 1.00 | 125.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 432.500.000,00 | | | 4 | - |
| 5.01.03.2.03.00 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | | 2.00 | 227.918.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.03.00 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | | 4.00 | 62.500.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.01.03.2.03.00 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | | 4.00 | 80.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-----------|-----------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 5.01.03.2.03.00 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) | | 1.00 | 62.082.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase implementasi rencana kelitbangan (Persentase) | | 10 | 848.750.000,00 | | | | - |
| | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan(Persentase) | | 100 | | | | | |
| | | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (Persentase) | | 42,55 | | | | | |
| | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. (Persentase) | | 100 | | | | | |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 5 | 182.500.000,00 | | | 5 | - |
| 5.05.02.2.01.00 05 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan) | | 1.00 | 82.500.000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------|----------------|------------------------------|--|---|---|
| 5.05.02.2.01.00 12 | Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan) | | 1.00 | 100.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Yang Disusun (Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 200.000.000,00 | | | 4 | - |
| 5.05.02.2.02.00 02 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen) | | 1.00 | 100.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.05.02.2.02.00 09 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen) | | 1.00 | 100.000.000,00 | | | | |
| 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Disusun(Dokumen) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 4 | 100.000.000,00 | | | 4 | - |
| 5.05.02.2.03.00 07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen) | | 1.00 | 100.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi Yang Disusun (Laporan) | (Bappelitbangda, KAB. PURWAKARTA) | 3 | 366.250.000,00 | | | 3 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|------|----------------|--|--|--|---|
| 5.05.02.2.04.00 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen) | | 1.00 | 140.000.000,00 | PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) | | | - |
| 5.05.02.2.04.00 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) | | 1.00 | 226.250.000,00 | | | | |

BAB V **PENUTUP**

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Renja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappelitbangda. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semoga Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

Purwakarta, 31 Juli 2023

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURWAKARTA,**

